

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Klausula nonkompetisi menjadi instrumen penting dalam menjaga rahasia dagang, keunggulan kompetitif, dan melindungi aset intelektual perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula nonkompetisi tidak dapat diterapkan untuk setiap jenis perusahaan. Klausula ini hanya relevan bagi perusahaan yang memiliki rahasia dagang dan kompetitor, serta memerlukan periode waktu tertentu agar pekerja melupakan atau tidak dapat langsung memanfaatkan sistem dan informasi rahasia yang diperolehnya selama bekerja.

Aspek yuridis menunjukkan bahwa klausula nonkompetisi harus memperhatikan keadilan, kelayakan, dan perlindungan hak pekerja agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan penerapan klausula nonkompetisi harus proporsional dan diimbangi dengan penghormatan terhadap hak pekerja.

Mekanisme pengawasan yang ideal juga diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak pekerja. Mengingat klausula ini merupakan bagian dari perjanjian kerja, pengawasannya menjadi tanggung jawab dinas tenaga kerja melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan. Mekanisme yang ideal dalam hal ini adalah penerapan sistem pengawasan aktif yang mewajibkan setiap

perusahaan melaporkan perjanjian kerja kepada dinas tenaga kerja. Selanjutnya, dinas tenaga kerja melakukan peninjauan untuk memastikan klausula nonkompetisi yang diterapkan tidak bertentangan dengan keadilan, kelayakan, dan perlindungan hak pekerja sebelum perjanjian diberlakukan.

## **B. Saran**

1. Saran bagi perusahaan diharapkan menerapkan klausula nonkompetisi secara proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dan hak pekerja. Dalam menyusun perjanjian kerja, perusahaan perlu memastikan bahwa penerapan klausula nonkompetisi tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama dan sanksi yang sangat memberatkan bagi pekerja. Selain itu, perusahaan sebaiknya melakukan konsultasi dengan dinas tenaga kerja untuk memastikan bahwa klausula nonkompetisi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip keadilan dan kelayakan.
2. Saran bagi pekerja diharapkan lebih memahami implikasi hukum dari klausula nonkompetisi sebelum menyepakati perjanjian kerja. Oleh karena itu, pekerja sebaiknya membaca dengan cermat setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak perusahaan jika terdapat klausula yang berpotensi merugikan. Jika diperlukan, pekerja dapat berkonsultasi dengan ahli hukum atau serikat pekerja untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi.

3. Saran bagi pemerintah dan dinas tenaga kerja diharapkan dapat menyusun pengaturan yang lebih jelas mengenai klausula nonkompetisi untuk memberikan kepastian hukum, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta mendorong standar perlindungan rahasia dagang yang tetap menghormati hak-hak pekerja. Dinas tenaga kerja juga perlu lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan klausula nonkompetisi dalam perjanjian kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan mekanisme pengawasan aktif, yaitu setiap perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan perjanjian kerja untuk dilakukan peninjauan sebelum diterapkan kepada pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*; Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- R.M Suryodiningrat, S.H, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Penerbit Tarsito, Bandung
- Salim H.S, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Salim H.S, 2003, *Hukum Perjanjian, Teori, dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan*, Penerbit Nuasa Aulia, Bandung
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermedia, Jakarta
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti, Tjitrosudibio R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung

### Jurnal/Majalah

- Ahsana Nadiyya, 2021, “Analisis Pengaturan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Singapura”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, VolXI/No-02/November/2021, Universitas Semarang.
- Mochamad Nuzul Fatoni, Merline Eva Lyanthi, 2023, *Legalitas Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan di Indonesia*, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, Nomor 6.
- Muhammad Amin, Maula Sari, 2023, “Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur’an dan Konstitusi”, *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, VolVIII/No-01/Januari-Juni/2023, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mustari, 2016, Hak atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang, *Jurnal Supremasi*, Vol.XI, Nomor 2.
- Nanda Novia Putri, dkk, 2024, “Kajian Yuridis terhadap *Non Competition Clause* dalam Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Hukum*, VolIII/No-01/Juni/2024, Universitas Jabal Ghafur.
- Rio Sutarko, Sudjana, 2018, Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dikaitkan dengan Prinsip Kerahasiaan Perusahaan dalam perspektif Hak untuk Memilih Pekerjaan berdasarkan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Al Amwal*, Vol.1, No.1.

- Rizka Amelia, dkk, 2024, “Analisis Konsep Dasar Bekerja; Teori dan Implementasi dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Topik Manajemen*, VolII/No-01/Januari/2024, Picmotiv.
- Siti Zikrina Farahdiba, dkk, 2021, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Kewarganegaraan*, VolIV/No-02/Desember/2021, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Abraham Adonai, 2023, *Pencantuman Klausula Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/PN.blb)*, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Fani Nurfadila, 2024, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian (Studi Putusan Nomor : 2961 K/Pdt/2019)*, Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shanisa Berliana Indah Sari, 2024, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Hak Atas Rahasia Dagang dengan Klausul Non Kompetisi dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus pada Coffee Shop atau Kedai Kopi di Magelang, Jawa Tengah)*, Universitas Tidar.

### **Peraturan Perundangan-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## Kamus

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn, West Group.

## Online

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023, Hukumnya Dipaksa Sepakati *Non-Competition Clause* Saat Resign, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-dipaksa-sepakati-non-competition-clause-i-saat-iresign-i-lt5327f77c4c646/>, diakses 24 September 2024.

Ghansam Anand, 2022, Prestasi Debitur Dilaksanakan Kreditur, Bagaimana Hukumnya?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prestasi-debitur-dilaksanakan-kreditur-lt6298879d9a5db/>, diakses 20 November 2024.

Letezia Tobing, 2013, Masalah Klausul Non-Kompetisi (*Non-Competition Clause*) dalam Kontrak Kerja, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514f29fbb8c02/masalah-klausul-nonkompetisi-non-competition-clause-dalam-kontrak-kerja>, diakses 25 September 2024.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Upaya Pemenuhan dan Pelindungan HAM, 2022, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/11/25/2272/mewujudkan-kesejahteraan-sosial-sebuah-upaya-pemenuhan-dan-pelindungan-ham.html>, diakses 26 September 2024.

Nafiatul Munawaroh, 2023, Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/>, diakses 3 Februari 2025.

Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Guna Mewujudkan Sleman yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi, 2022, <https://bappeda.slemankab.go.id/penerapan-ilmu-pengetahuan-teknologi-dan-inovasi-guna-mewujudkan-sleman-yang-unggul-dan-berdaya-saing-tinggi.slm>, diakses 24 September 2024.

Rizky Amelia, 2022, Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-adendum-mengubah-hal-pokok-perjanjian-lt628c7b7d961c5/>, diakses 3 Februari 2025.

Willa Wahyuni, Hak Konstitusional Warga Negara, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>, diakses 24 September 2024.